

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN RUMAH UNTUK
NELAYAN DI DESA LINGGI, KECAMATAN SIMEULU
TIMUR, KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI



**Diajukan Oleh:
RINCANI MULYA RISMA
NIM. 210802110**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2025 M / 1447 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricani Mulya Risma
NIM : 210892110
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Untuk Nelayan di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan tugas akhir/skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mempertanggungjawabkan atas karya ini;

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Banda Aceh, 7 Juli 2025

Yang Menyatakan



(Ricani Mulya Risma)

PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN RUMAH UNTUK NELAYAN
DI DESA LINGGI, KECAMATAN SIMEULU TIMUR, KABUPATEN
SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

RINCANI MULYA RISMA
NIM.210802110

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 23 Juli 2025

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:



Delfi Suganda, S.H.I., LL.M
NIP.19861122015031

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN RUMAH UNTUK
NELAYAN DI DESA LINGGI, KECAMATAN SIMEULUE
TIMUR, KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

RINCANI MULYA RISMA

NIM. 210802110

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Agustus 2025

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris,

Dr. Delfi Suganda, S.HI., LLM.

NIP. 198611122015031005

Shafiur Rahman, S.A.P

NIP.

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si

NIP. 196110051982031007

Dr. Taufik, S.Sos., M.Si

NIP. 198905182023211032

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197403211999031005

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi perikanan yang besar memiliki peran penting nelayan dalam perekonomian, khususnya di daerah pesisir seperti Desa Linggi, Simeulue Timur, yang masih banyak nelayannya hidup dalam kondisi rumah tidak layak, numpang dengan mertua dan belum memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, program bantuan rumah khusus nelayan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan bantuan rumah nelayan di Desa Linggi serta kendala yang dihadapi untuk meningkatkan efektivitas program dan kesejahteraan nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi kebijakan bantuan rumah nelayan di Desa Linggi serta kendala yang dihadapi. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan model Miles dan Huberman. Fokus analisis meliputi Kebijakan Ideal, Kelompok Sasaran, Organisasi Pelaksana, dan Faktor Lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi kendala, terutama ketidakjelasan regulasi kepemilikan rumah dan pembagian tanggung jawab antar instansi, sehingga koordinasi kurang optimal. Proses seleksi penerima bantuan yang kurang transparan menyebabkan tidak semua nelayan berhak mendapat manfaat. Faktor lingkungan seperti lokasi rumah yang jauh dari pesisir dan infrastruktur yang buruk juga menghambat aktivitas nelayan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan bantuan rumah untuk nelayan di Desa Linggi masih menghadapi kendala terkait regulasi, koordinasi antarinstansi, dan lokasi rumah yang kurang strategis.

Kata Kunci: Kebijakan Bantuan Rumah Nelayan, Implementasi dan Kendala, Kesejahteraan Nelayan

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN RUMAH UNTUK NELAYAN DI DESA LINGGI, KECAMATAN SIMEULU TIMUR, KABUPATEN SIMEULUE"** ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umatnya yang tetap teguh berada di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa pencapaiannya tidak lepas dari dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Eka Januar, M.Soc.Sc., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. Muhammad Thalal, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

4. Muazzinah, M.PA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, yang selalu mendukung dan memberikan bimbingan.
6. Para pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, serta membimbing penulis dengan sabar hingga skripsi ini selesai.
7. Kedua orang tua tercinta, atas doa, dukungan moral, dan materi yang tiada henti.
8. Rekan-rekan mahasiswa, yang senantiasa membantu dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan perumahan bagi nelayan.

Banda Aceh, 10 Desember 2024

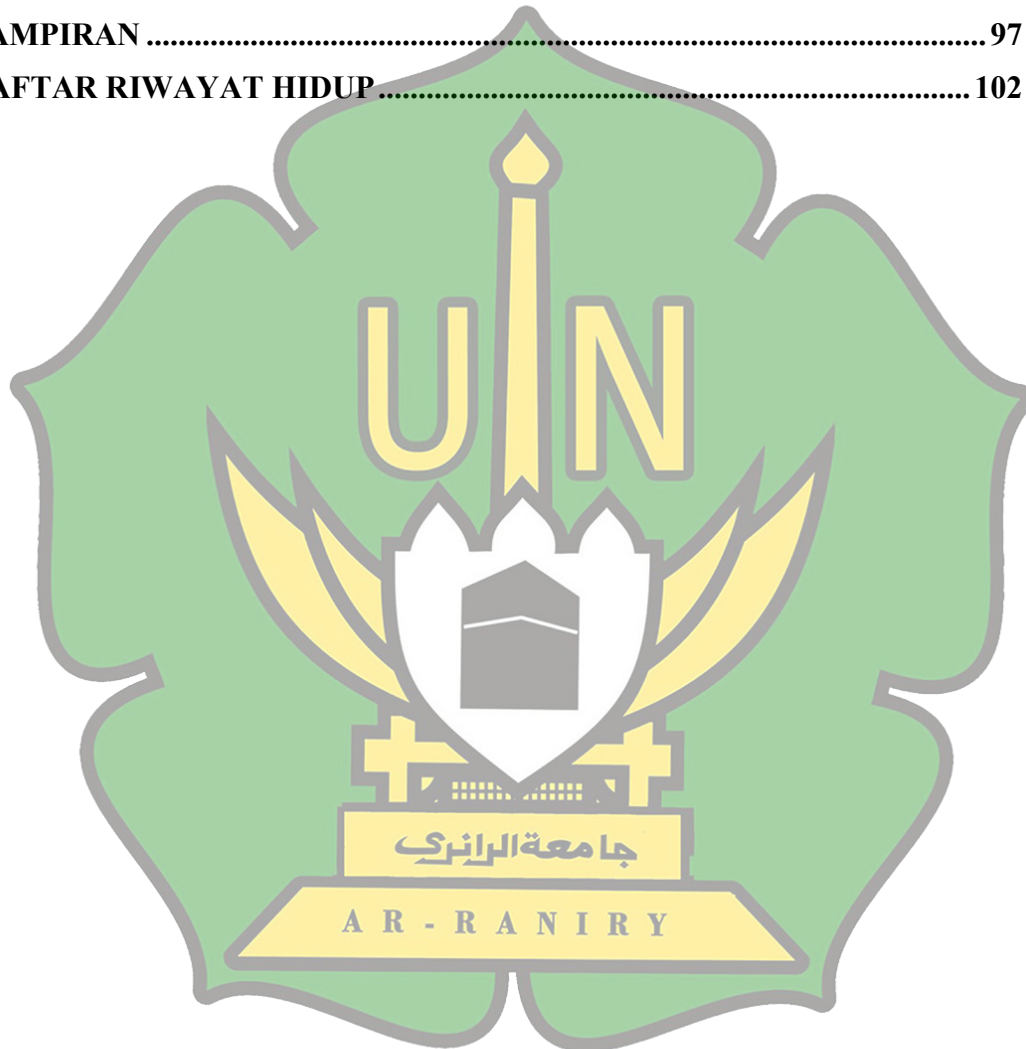
Rincani Mulya Risma

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Penjelasan Istilah.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Penelitian Terdahulu	13
2.2. Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.2.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik	18
2.2.3. Model - Model Implementasi Kebijakan	21
2.2.4 Standar dan Sasaran Kebijakan.....	24
2.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	26
2.4. Konsep Rumah Bantuan.....	28
2.5. Konsep Nelayan	30
2.6. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34

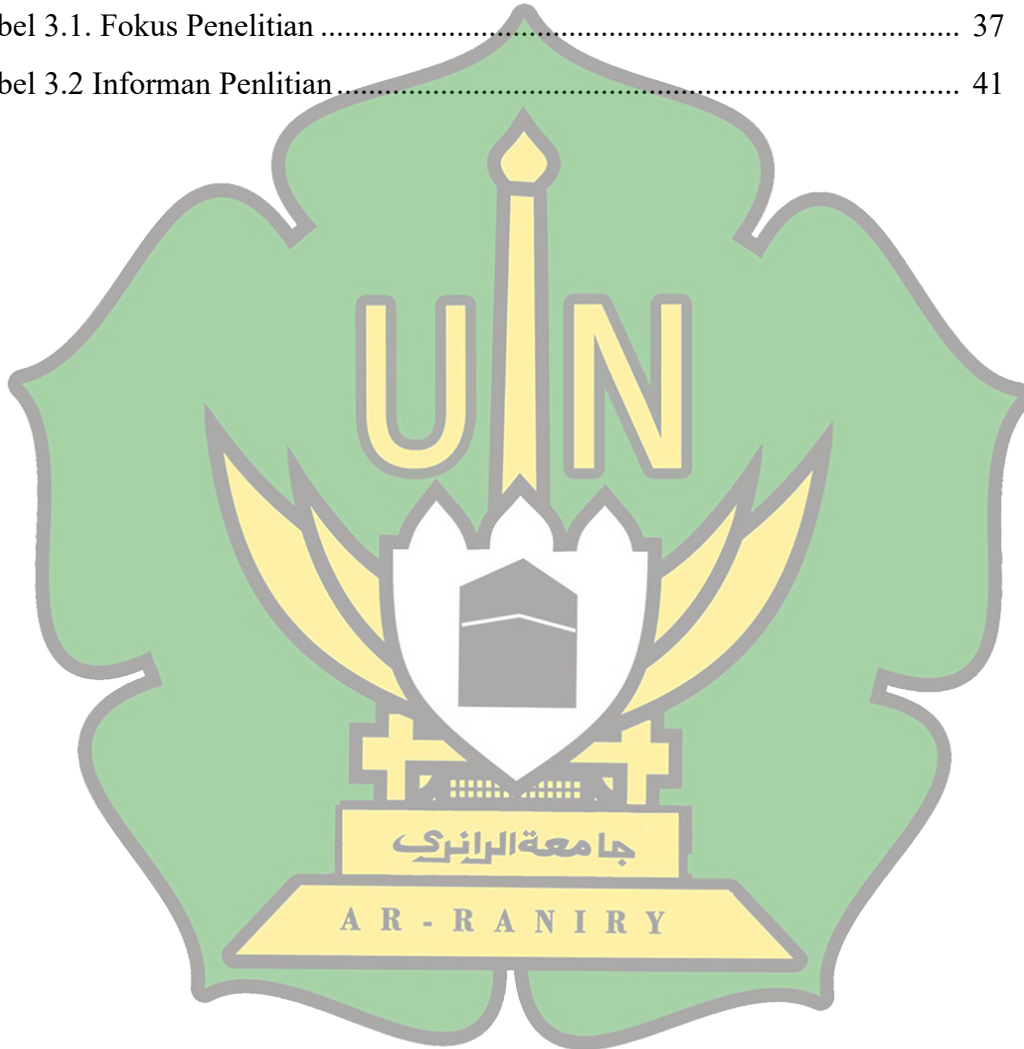
3.1. Desain Penelitian.....	34
3.2. Fokus Penelitian.....	34
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.4. Sumber Data.....	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6. Informan Penelitian.....	39
3.7. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.2 Hasil Penelitian	45
4.2.1 Kejelasan Tujuan Kebijakan Bantuan Rumah untuk Nelayan.....	45
4.2.2 Konsistensi Kebijakan dengan Kebutuhan Nelayan	46
4.2.3 Regulasi dan Prosedur yang Mendukung Implementasi Kebijakan	48
4.2.4 Tingkat Pemahaman Nelayan terhadap Kebijakan Bantuan Rumah	50
4.2.5 Kesesuaian Penerima Bantuan dengan Kriteria yang Ditetapkan	53
4.2.6 Partisipasi Nelayan dalam Proses Implementasi Kebijakan	55
4.2.7 Kapasitas Lembaga Pelaksana dalam Menjalankan Kebijakan ...	58
4.2.8 Koordinasi Antar Lembaga Terkait.....	61
4.2.9 Efektivitas Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan.....	63
4.2.10 Pengaruh Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik terhadap Implementasi Kebijakan	66
4.2.11 Respons Masyarakat terhadap Kebijakan Bantuan Rumah	68
4.2.12 Dukungan dari Pihak Eksternal seperti M atau Sektor Swasta ..	70
4.3 Pembahasan.....	72
4.3.1 Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah untuk Nelayan di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue	72
4.3.2 Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Rumah untuk Nelayan di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue	80

BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1. Fokus Penelitian	37
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	41



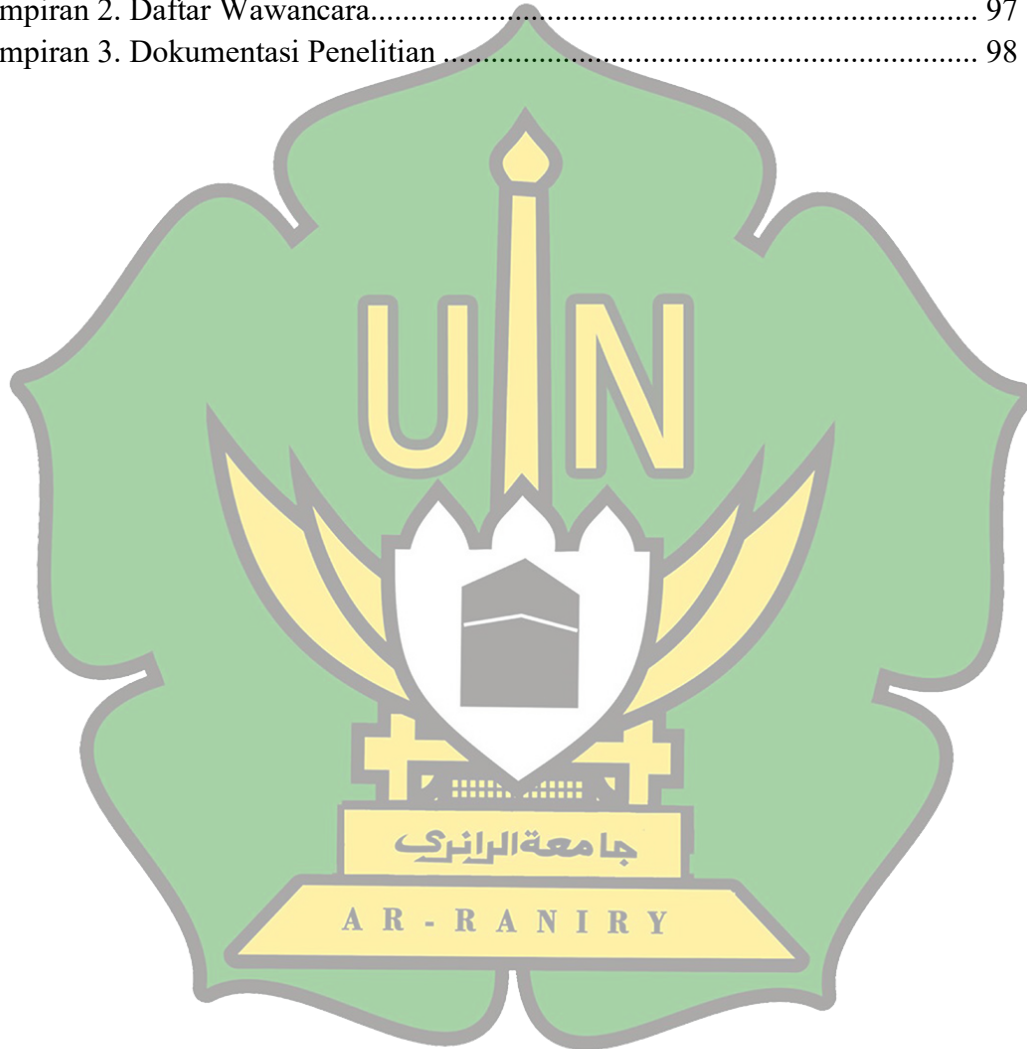
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	35
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	96
Lampiran 2. Daftar Wawancara.....	97
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah perairan yang luas, sehingga sektor perikanan berperan penting dalam perekonomian nasional.¹ Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS), Indonesia memiliki luas laut sebesar 3.257.357 km², menjadikannya salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Potensi ini memberikan keuntungan besar, terutama dari hasil laut seperti perikanan.²

Nelayan menjadi salah satu tulang punggung dalam menggerakkan sektor ini.³ Nelayan di Indonesia terbagi dalam beberapa kategori, yaitu nelayan pemilik (juragan) yang memiliki kapal dan alat tangkap, nelayan penggarap (buruh) yang bekerja dengan upah bagi hasil, nelayan tradisional yang menggunakan perahu dan alat sederhana dengan jangkauan terbatas, nelayan kecil yang mengadopsi motorisasi untuk memperluas jangkauan, dan nelayan gendong yang membeli ikan

¹ Christine, Michelle, Chairandy Fajri, and Hafiz Agung Rifai. "Konsekuensi Berlanjutnya Illegal Fishing bagi Pelaku Keamanan Maritim dan Masyarakat Pesisir di Indonesia, dan Pemberantasan IUU Fishing." *Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan* 4.2 (2021), hlm.14.

² Portal Informasi Indonesia, 2023, *Menyiapkan Tata Kelola Laut Berkelanjutan*, Link: <https://indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum-2023/7295/menyiapkan-tata-kelola-laut-berkelanjutan?lang=1>. Diakses 5 Desember 2024.

³ Aminuddin, Muhammad Abrar, and Agussalim Burhanuddin. "Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1.4 (2023), hlm.157.

di tengah laut menggunakan modal dari juragan tanpa melakukan penangkapan ikan sendiri.⁴

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah nelayan di berbagai kabupaten/kota di Aceh pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Secara keseluruhan, jumlah nelayan di Aceh berkurang dari 74.719 orang pada tahun 2014 menjadi 71.064 orang pada tahun 2015. Meskipun demikian, produksi ikan menunjukkan peningkatan, dengan total produksi naik dari 159.487,40 ton pada 2014 menjadi 165.778,80 ton pada 2015. Di Kabupaten Simeulue, jumlah nelayan tetap stabil di angka 3.387 orang, akan tetapi produksi ikan meningkat signifikan dari 4.288,20 ton menjadi 6.630,90 ton.⁵

Menurut Data Badan Statistik Provinsi Aceh (2022), Kabupaten Simeulue di Provinsi Aceh melaporkan produksi perikanan tangkap laut sebesar 36.145 ton dengan nilai produksi mencapai Rp 585.488.115 ribu. Selain itu, produksi perikanan perairan umum daratan di Simeulue tercatat sebesar 55 ton dengan nilai produksi Rp 1.491.720 ribu. Secara keseluruhan, total produksi perikanan tangkap di kabupaten ini mencapai 36.200 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 586.979.835 ribu, menunjukkan kontribusi signifikan sektor perikanan terhadap perekonomian daerah tersebut.⁶

⁴ Mote, Herry Hendri, Emiliana Rahail, and Ricky Rumbewas. "Implementasi Hukum Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Kepada Nelayan Kecil." *Bacarita Law Journal* 5.1 (2024), hlm.156.

⁵ Badan Pusat Statistik Aceh, 2024, Jumlah Petani/Nelayan dan Produksi Ikan, 2014-2015, Link: <https://indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum-2023/7295/menyiapkan-tata-kelola-laut-berkelanjutan?lang=1>. Diakses 5 Desember 2024.

⁶ Badan Pusat Statistik Aceh, 2024, Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Aceh, 2022, Link: <https://aceh.bps.go.id/id/statisticstable/3/TIRkSE0xQmlRWEpYVUUhBeVVVTm9NWE5hYmtSd1p6MDkjMw==/produksi-dan-nilai-produksi-perikanan-tangkap-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-penangkapan-di-provinsi-aceh--2022.html?year=2022>. Diakses 5 Desember 2024.

Menurut Badan Statistik Simeulu (2014) menunjukkan jumlah nelayan di Kabupaten Simeulue mencapai 3.474 orang, mengalami peningkatan dari 3.429 orang pada tahun 2013 dan 3.380 orang pada tahun 2012. Kecamatan dengan jumlah nelayan terbanyak adalah Simeulue Timur (721 orang) dan Simeulue Barat (448 orang), sedangkan jumlah terendah terdapat di Simeulue Cut (233 orang).⁷ Kecamatan Simeulue Timur memiliki jumlah nelayan terbanyak di Kabupaten Simeulue, yaitu sebanyak 721 orang. Salah satu desa yang berada di kecamatan Simeulu Timur adalah Desa Linggi.

Pada Maret 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan 50 unit rumah khusus (rusus) tipe 28 kepada masyarakat nelayan di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan menyediakan hunian yang layak huni. Penyerahan rumah tersebut dilakukan di Pendopo Kabupaten Simeulue dan disaksikan oleh Bupati Simeulue, Erli Hasim, serta Kepala Satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh, Lilik Lastantyo Adiarso. Pembangunan rumah ini memerlukan anggaran sebesar Rp 6,4 miliar, sementara pembangunan sarana umum seperti jalan dan saluran air bersih memakan biaya Rp 713 juta. Selain itu, rumah tersebut dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti talud penahan tanah. Pihak pemerintah daerah berkomitmen untuk memelihara dan mengoperasikan rumah-rumah tersebut agar tidak

⁷ Badan Pusat Statistik Simeulu, 2016, Jumlah Nelayan Menurut Kecamatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2014, Link: <https://simeuluekab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTE3IzE=/jumlah-nelayan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-simeulue-tahun-2014.html>. Diakses 5 Desember 2024.

terbengkalai. Program ini merupakan bagian dari tugas Kementerian PUPR untuk menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat nelayan miskin.⁸

Linggi merupakan desa yang terletak di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Dengan luas wilayah 9,26 km², desa ini terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Mulia dan Dusun Bahagia. Linggi dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas nelayan yang cukup tinggi, mengingat lokasinya yang strategis di wilayah pesisir Simeulue Timur. Desa ini menjadi bagian dari kawasan yang mendukung sektor perikanan tangkap sebagai salah satu sumber utama mata pencaharian penduduknya, sejalan dengan karakteristik wilayah Simeulue yang kaya akan hasil laut yang membuat sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan.

Berdasarkan hasil observasi tanggal 2 Desember 2024 di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan yang tergolong kurang mampu masih tinggal di rumah tidak layak huni dengan kondisi memprihatinkan, seperti dinding yang terbuat dari papan rapuh, atap bocor, dan minim akses fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik. Selain itu, lokasi rumah yang berada di daerah rawan banjir dan gelombang pasang menambah kerentanan mereka terhadap bencana alam. Meskipun program bantuan rumah nelayan telah dicanangkan, implementasinya di Desa Linggi menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pendataan yang akurat, alokasi bantuan yang tidak merata, serta minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar

⁸ Kompas.com, 2020, Nelayan di Simeulue Timur dapat Rumah Layak Huni dari Kementerian PUPR, Link: <https://properti.kompas.com/read/2020/03/27/103330321/nelayan-di-simeulue-timur-dapat-rumah-layak-huni-dari-kementerian-pupr>. Diakses 10 Desember 2024.

penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bantuan rumah bagi nelayan kurang mampu di desa tersebut, guna memberikan rekomendasi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Kondisi sosial-ekonomi yang rendah, ditambah dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti perumahan yang layak, menjadi permasalahan yang dihadapi oleh nelayan kecil.⁹ Program bantuan rumah untuk nelayan bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak, aman, dan sehat bagi keluarga nelayan miskin.¹⁰ Program ini dilandasi oleh berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur hak masyarakat miskin atas perumahan, sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.¹¹ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”*.¹² Amanat ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*¹³

Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Nelayan. Undang-undang ini menjelaskan perlindungan terhadap nelayan kecil,

⁹ Abdullah, Asran. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat." *Jurnal Sosiologi Miabhari* 2.1 (2024), hlm 38.

¹⁰ Hayati, Zahratul. *Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Studi Pada Kelompok Nelayan Di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

¹¹ Casum, Casum. *Rekontruksi Regulasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dengan Berbasis Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

¹² Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

¹³ UUD Nomor 1 Tahun 2011.

termasuk akses terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan.¹⁴ Kehidupan nelayan kecil di Indonesia sarat, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan.¹⁵

Penelitian oleh Zahratul Hayati (2021) mengenai implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan di Desa Teluk Batil, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, menunjukkan bahwa program tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan, meskipun terdapat ketidaktepatan dalam penentuan lokasi penerima bantuan. Penelitian ini menunjukkan implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan di Desa Teluk Batil, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, telah berjalan sesuai tujuan program berdasarkan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Program ini dinilai mampu meringankan beban ekonomi keluarga nelayan dan memberikan manfaat signifikan, meskipun ditemukan ketidaktepatan dalam pemilihan lokasi penerima bantuan, mengingat sebagian besar nelayan berada di daerah lain seperti Kelurahan Mengkapan, Teluk Mesjid, Bunsur, dan Tanjung Kuras.¹⁶

Penelitian oleh Guntur Fernanto, Suwaib Amiruddin, dan Delly Maulana (2022) menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Banten, Kota Serang, belum berjalan secara efektif. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan dan kurun waktu implementasi, kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala. Sosialisasi program kepada nelayan dinilai kurang

¹⁴ Pangestu, Yudha, Bernard Sipahutar, and Budi Ardianto. "Harmonisasi prinsip perdagangan internasional pada GATT dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2.1 (2021), hlm.81.

¹⁵ Septiandika, Verto, and Alifia Maulidin. "Strategi Pengembangan Hasil Perikanan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan (Studi Pada Dinas Perikanan Kota Probolinggo)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6.4 (2022), hlm.32.

¹⁶ Hayati, Zahratul. *Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Studi Pada Kelompok Nelayan Di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021, hlm.22.

optimal, dan distribusi manfaat program belum merata, sehingga banyak nelayan belum mendapatkan akses pemberdayaan. Hambatan utama meliputi tidak adanya refocusing anggaran selama pandemi Covid-19, ketiadaan lembaga khusus pemberian modal bagi nelayan, serta proses pelaksanaan program yang lambat akibat ketidakpastian waktu pengajuan proposal. Selain itu, banyak nelayan yang masih terikat utang dengan tengkulak, yang semakin membatasi dampak positif kebijakan ini.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Untuk Nelayan di Desa Linggi, Kecamatan Simeulu Timur, Kabupaten Simeulue”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan rumah bagi nelayan di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dengan fokus pada pelaksanaan program, efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan kurang mampu, serta kendala yang dihadapi selama proses tersebut.

¹⁷ Fernanto, Guntur, Suwaib Amiruddin, and Delly Maulana. "Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan." *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4.1 (2022), hlm.194.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa masalah utama terkait implementasi kebijakan bantuan rumah untuk nelayan di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur:

1. Pendataan yang tidak akurat menyebabkan beberapa nelayan yang berhak tidak terdaftar, sementara alokasi bantuan sering kali tidak merata, mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan.
2. Minimnya sosialisasi mengenai kebijakan bantuan rumah menyebabkan nelayan kurang memahami prosedur dan manfaat program, yang menghambat partisipasi aktif mereka dalam program tersebut.
3. Sebagian besar nelayan tinggal di rumah yang tidak layak huni dan berada di daerah rawan bencana alam, menjadikan mereka lebih rentan terhadap dampak bencana serta memperburuk kualitas hidup mereka.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan bantuan rumah untuk nelayan di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan bantuan rumah untuk nelayan di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan bantuan rumah untuk nelayan di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan bantuan rumah untuk nelayan di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan bantuan sosial untuk nelayan.
2. Memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan pemerintah di sektor perikanan.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas program bantuan rumah bagi nelayan, termasuk dalam hal pendataan dan sosialisasi.

2. Memberikan informasi yang berguna bagi nelayan di Desa Linggi untuk memanfaatkan kebijakan bantuan rumah dengan lebih optimal.

1.6. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam judul dan isi penelitian ini, berikut adalah penjelasan istilah-istilah yang relevan:

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merujuk pada proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga terkait, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁸ Dalam implementasi, kebijakan yang telah disusun harus dijalankan melalui serangkaian langkah atau tindakan oleh pihak-pihak yang terlibat.¹⁹ Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada efektivitas komunikasi, koordinasi, serta sumber daya yang tersedia.²⁰ Implementasi yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.²¹

Implementasi kebijakan juga mencakup pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan yang diterapkan efektif dan memberikan dampak positif.

¹⁸ Sahputri, Ria Anjriani, and Siti Aisyah. "Implementasi Kebijakan Pimpinan dalam Disiplin Waktu terhadap Pegawai pada Bagian Umum di Kantor Sekretariat DPRD Labuhanbatu." *Jurnal Minfo Polgan* 12.2 (2023), hlm.2108.

¹⁹ Rismawati, Risa, Astri Siti Fatimah, and Ani Heryani. "Implementasi Kebijakan Tentang Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya." *JAK Publik (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)* 5.1 (2024), hlm.32.

²⁰ Manggopa, Fitria Yunita, and Moch Sakir. "Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 3.3 (2024), hlm.5757.

²¹ Cristianingsih, Endah. "Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 12.2 (2020), hlm 12.

Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, serta masyarakat yang terdampak. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari pelaksanaan yang tepat waktu, tetapi juga dari kemampuannya dalam mengatasi masalah yang ada, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan menjadi kunci untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa depan.²²

2. Konsep Bantuan Rumah

Bantuan rumah juga dapat mencakup aspek sosial dan ekonomi, dengan tujuan untuk menciptakan ketahanan masyarakat melalui perbaikan kondisi tempat tinggal. Dalam banyak kasus, bantuan rumah bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga membuka peluang bagi keluarga miskin untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Program ini dapat melibatkan berbagai jenis intervensi, seperti pelatihan keterampilan dalam konstruksi rumah, pengelolaan keuangan keluarga, atau bahkan akses ke layanan dasar lainnya seperti air bersih dan sanitasi. Dengan demikian, bantuan rumah diharapkan dapat mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.²³

²² Zahara, Widia. "Implementasi Kartu Indonesia Pintar Terhadap Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Simeulue." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 8.4 (2023).

²³ Arindhawati, Aulia Tafhana, and Evy Rahman Utami. "Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa ponggok, tlogo, ceper dan manjungan kabupaten klaten)." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4.1 (2020): 43-55.

3. Nelayan

Nelayan adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan yang berkaitan dengan penangkapan ikan atau hasil laut lainnya.²⁴ Nelayan memiliki peran yang sangat penting, terutama di daerah pesisir, karena mereka menyediakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk konsumsi manusia dan industri.²⁵ Di banyak daerah, pekerjaan sebagai nelayan menjadi mata pencaharian utama bagi keluarga, dengan menggunakan berbagai jenis peralatan untuk menangkap ikan, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih moderen.²⁶

Selain sebagai penyedia sumber daya alam, nelayan juga memiliki peran penting dalam keberlanjutan ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, keberhasilan nelayan dalam menangkap ikan tidak hanya bergantung pada keahlian dan peralatan yang mereka gunakan, tetapi juga pada kebijakan dan pengaturan yang ada untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, nelayan seringkali membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, bantuan peralatan yang ramah lingkungan, dan akses ke pasar yang lebih baik. Dengan demikian, pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan sangat bergantung pada keseimbangan antara kebutuhan nelayan dan pelestarian sumber daya laut.²⁷

²⁴ Sayful, M. "Strategi penghidupan nelayan pedagang di tempat pelelangan ikan (lelong)." *SIGn Journal of Social Science* 1.1 (2020), hlm.2.

²⁵ Kristiyanti, Mariana, Kundori Kundori, and Renny Hermawati. "Membangun sumber daya manusia dan teknologi informasi sebagai dasar kejayaan maritim di Indonesia." *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim* 23.2 (2023), hlm.109.

²⁶ Masbaitubun, Novena, Melianus Salakory, and Djalaludin Salampessy. "Aktivitas Nelayan Tangkap Ikan dan Kondisi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Nelayan Ikan di Desa Warbal Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara)." *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti* 2.2 (2023), hlm.123.

²⁷ Subagiyo, Aris, Wawargita Permata Wijayanti, and Dwi Maulidatuz Zakiyah. *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Universitas Brawijaya Press, 2017.